

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Siti Hasanah

Sitihasanah210196@gmail.com

Nur handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Capital Expenditure on economic growth of cities/districts of East Java province during 2014-2018. The population was 38 cities/districts of East Java province during 2014-2018. Moreover, the instrument in data collection technique used documentation, in which observing documents or data was needed. Furthermore, the data were secondary. Additionally, they were taken indirectly by the researcher through intermediary media, which was taken and recorded by others, which taken from website of Regional Financial and Asset Management Agency and central Statistics Agency. Additionally, pre-requisite test for data analysis used normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test. In addition, hypothesis test used multiple linear regression with t-test, f-test, and determination coefficient test. According to the research result, it concluded as follows: (1) Local-owned Source Revenue had a positive effect on economic growth of cities/districts of East Java province during 2014-2018, (2) Capital Expenditure had a negative effect on economic growth of cities/districts of East Java province during 2014-2018, and (3) General Allocation Fund had a negative effect on economic growth of cities/districts of East Java province during 2014-2018.

Keywords: local-owned source revenue, capital expenditure, general allocation fund, economic growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen - dokumen atau data yang dibutuhkan dan jenis pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang diambil melalui website Badan pengelola keuangan dan asset daerah dan Badan pusat statistika. Sebagai tambahan, Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Didalam suatu daerah apabila semakin tingginya pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri, maka semakin tinggi juga kemampuan masyarakat untuk bisa membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat relatif tinggi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga dalam tingkat konsumsi maupun produktivitas penduduk juga

semakin tinggi. Hal ini dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah - daerah, untuk itu sumber pendapatan asli daerah yang paling tinggi selanjut nya digunakan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pelayanan publik yang memadai dan terpenuhi sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. (Fani *et al.*, 2018) .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut (BPS 2015;15) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan Kegiatannya. Pendapatan lain telah disampaikan oleh (Nordiawan *et al.*, 2007;181) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri. *Local Government Revenue* atau PAD Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber.

Sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 BAB V Pasal 6 ayat 2, Meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan (e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 BAB V Pasal 7, disebut bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: (1) Menetapkan Peraturan Daerah Tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan (2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor / ekspor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan disebut bahwa PAD bersumber dari (1) Pajak daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain - lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua Kabupaten/Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. UU No.25 tahun 1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% (26% pada UU No. 33 tahun 2004) dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Halim 2012). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah asset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga dalam

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?, (3) Apakah Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori Agensi adalah suatu hubungan atau kontrak antara principal dan agent (Anthony dan Govindarajan, 2015). Principal dalam hal ini yaitu pemilik sumber daya ekonomis, sedangkan agen yaitu pengelola dari sumber daya ekonomis tersebut. Didalam pemerintah teori ini dapat diterapkan dalam hal hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, dimana eksekutif berperan sebagai agen, sedangkan legislatif berperan sebagai principal. Dalam teori agensi penerapan pemerintah, legislatif selaku prinsipal memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa rancangan APBD yang dikenal dengan sifat desentralisasi untuk perwujudan desentralisasi fiskal.

Rancangan APBD ini digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masing - masing daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak / retribusi dan mengelola sumber daya alam. Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan di dalam teori keagenan terdapat hubungan yang diibaratkan sebuah kontrak yang mana antara satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, dalam hal ini disebut agen, untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Penyusunan APBD Yang dibuat Antara Executive Dan Legislatif Berpedoman Pada Kebijakan Umum Pihak eksekutif membuat rancangan APBD Yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama - sama sebelum ditetapkan sebagai perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto, 2007). Dalam teori agensi penerapan pemerintah selaku principle legislatif memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen Dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa desentralisasi untuk perwujudan desentralisasi fiskal. Rancangan APBD ini digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga setiap daerah diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Susanti *et al.*, (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Michel P. Todaro (2004:92), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah daerah dan pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerahnya (Kuncoro, 2004).

Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Diantara faktor-faktor tersebut, permodalan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut sudut pandang ekonomi neoklasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan pasokan faktor-faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan Keempatannya (BPS, 2015:15). Pendapatan lain disampaikan oleh Nordiawan (2007) bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri. Setiap daerah pasti memiliki sumber dayanya sendiri yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan (*income*) guna menjalankan roda perekonomiannya. Pendapatan ini bisa disebut Pendapatan Pemerintah Daerah (PAD), yang dalam bahasa Inggris disebut "*Local Government Revenue*".

Pendapatan asli daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam UU Nomer 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber – sumber PAD terdiri pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah, dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Syarifin *et al.*, 2005). Penyaluran dana alokasi umum didasarkan beberapa hal, yaitu: (1) kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, (2) setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diukur secara berturut – turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia, (3) kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "*block grant*", yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat minimal 26% dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal Sustainability pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26% dari total pendapatan negeri netto.

Dalam perhitungan DAU, permintaan di daerah ini tercermin dalam variabel permintaan keuangan, seperti (1) Jumlah penduduk, (2) Luas wilayah, (3) Indeks kemahalan konstruksi, dan (4) Indeks Kemiskinan Relatif. Kebutuhan keuangan dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk mendanai seluruh belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi / lembaga daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1): belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Belanja modal memiliki dua kategori yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang memiliki hubungan dengan kegiatan pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja bang dan jasa, belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung dengan program. Seperti bunga, subsidi, hibah belanja pegawai, dan biaya tidak terduga. Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful: 2006) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah yang tujuannya untuk menambah asset dan juga untuk pemelihara dan pengadaan seperti proses balik nama dan sewa tanah, pencabutan penggosongan dan penyusunan sertifikasi serta pengeluaran lainnya seperti hak perolehan. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan peralatan dan mesin beserta pemeliharaannya sehingga dapat digunakan dengan baik nantinya dan memiliki manfaat selama 12 (dua belas bulan). Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan yang meliputi gedung tempat kerja, tempat tinggal, menara, dan bangunan bersejarah. Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan serta pemeliharaannya agar dapat digunakan dengan baik dan memiliki manfaat di daerah. Belanja modal asset tetap lainnya merupakan biaya pengeluaran untuk pengadaan asset tetap lainnya seperti barang - barang perpustakaan misalnya buku, jurnal ilmiah, barang bercorak kebudayaan dan bersejarah, barang untuk kebutuhan museum hewan dan tanaman.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan kegiatan sosial. Terdapat enam jenis pertumbuhan ekonomi berdasarkan produksi nasional dan komponen-komponennya, yaitu: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, (2) Peningkatan produktivitas, (3) Laju perubahan struktural yang tinggi, (4) Urbanisasi, (5) Pemekaran negara maju wilayah, (6) Arus komoditas, modal dan orang antar negara. Menurut Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung suatu proses pembangunan.

Penerimaan daerah sendiri yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah. Ada lima Indikator yang digunakan untuk menentukan suatu kota dikatakan ramah investasi, antara lain, Produk Domesyik Ragional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fasilitas dan sarana penunjang, ritel dan pasar, serta nilai realisasi investasi tahunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang paling membantu mendukung pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini didukung oleh temuan Mawarni *et al.*, (2013) yang menunjukkan bahwa perpajakan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menggunakan Dana Alokasi Umum untuk biaya operasional. Sebab, Undang-Undang, DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan masing-masing daerah. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal, upaya yang dapat dilakukan adalah mengalokasikan dana yang dihimpun pemerintah dari APBN untuk digunakan mendanai kegiatan daerah dalam lingkup otonomi. Hasil penelitian Mawarni *et al.*, (2013) membuktikan hal tersebut, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana secara umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Ekonomi

Berdasarkan definisi PP Nomor 71 Tahun 2010, beban Negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sementara itu, definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagai berikut: "Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih." Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat.

Serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategorikan utama, diantaranya adalah (1) belanja modal tanah, (2) belanja Modal Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan (5) Belanja Modal fisik lainnya. Seiring dengan peningkatan dan percepatan layanan dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi di kawasan juga akan meningkat. Hasil penelitian (Agustini *at al.*, 2016) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan variabel perantara. Mengingat penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui belanja modal juga didanai oleh dana perimbangan tersebut, maka dapat dimaklumi bahwa hubungan positif yang erat antara dana perimbangan dan belanja modal ini.

H₃: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian dengan melihat karakteristik masalah berupa hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih serta berupa data dan angka - angka. (Sugiyono, 2014) Penelitian ini dilakukan di 38 Kabupaten /Kota yang ada di Jawa Timur guna mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Dalam penelitian ini menggunakan satu jenis dependent Variabel (Variabel Terikat) dan tiga jenis Independent Variabel (Variabel bebas). Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Serta, Variabel Dependent nya adalah Pertumbuhan Ekonomi yang masing masing diukur menggunakan data realisasi Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 2014-2018.

Gambaran dan Populasi

Populasi adalah gambaran umum obyek atau subyek yang diteliti yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang merupakan sasaran penelitian yang dijadikan responden dan informan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten/Kota.

Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen - dokumen atau data yang dibutuhkan dan jenis pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Teknik pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Selain itu, data jumlah penduduk dan PDRB diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel Penelitian

Pembagian variabel berdasarkan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Variabel independen atau juga dikenal variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen (Suliyanto, 2011:7). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal. (2) Variabel dependen, merupakan variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen (Suliyanto, 2011:8). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk mengukur konsep dan memberikan cara bagaimana seharusnya dalam mengukur variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini, terdiri dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja modal. Sedangkan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan Keempatannya (BPS, 2015:15). Pendapatan lain disampaikan oleh Nordiawan (2007:181) bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri. Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai Local Government Revenue. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber. Pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan} + \text{Lain - Lain PAD yang Sah} \times 100\%$$

Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan - kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2012). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi pembangunan DAU untuk daerah provinsi dan Kabupaten / Kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU perdaerah rumusnya adalah:

Dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relative kecil atau rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar dan banyak. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan - kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2012). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi pembangunan DAU untuk daerah provinsi dan Kabupaten / Kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU perdaerah rumusnya adalah:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

DAU artinya alokasi

Keterangan:

AD = Alokasi DAU perdaerah

CF = Alokasi DAU berdasarkan celah fiscal

Belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah dengan melakukan pembangunan dan perbaikan sector pendidikan, kesehatan, transportasi dengan semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati manfaat dari pembangunan daerah dan masyarakat dapat juga merasakan kepemimpinan pemerintah yang adil. Ketersediaan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan manfaat di suatu sector, dan produktivitas masyarakat diharapkan semakin meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal - hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Belanja modal dihitung dengan rumus (Halim, 2012):

BM: Realisasi Belanja Modal

$$\frac{\text{Total Belanja dalam RAPBD}}{\text{Total Belanja dalam RAPBD}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Susanti *et al.*, (2000: 23), pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut akan mendatangkan pendapatan lebih bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi setiap negara meliputi tiga faktor atau komponen utama yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Proses peningkatan output per kapita diwakili oleh Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) per kapita yang diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor usaha di suatu daerah, atau penjumlahan dari total nilai produk akhir. Disediakan oleh semua unit ekonomi di wilayah Layanan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dapat dihitung dengan rumus (Sukirno, 2007):

PE: $PDRB_t - PDRB_{t-1}$

$$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melalui beberapa tahapan penelitian yang dilakukan ini. Tahapan yang akan diteliti dengan menganalisis data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal ini menghitung variabel independen nyadan melakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan model analisis dan hipotesis.

Analisis Regresi Linnier Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi adanya kekuatan antara seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM + e$$

Dimana:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Slope atau Koefisien regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	: Dana Alokasi Umum (DAU)
BM	: Belanja Modal
e	: error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Data Uji Normalitas ini dapat dilakukan untuk menguji apakah variabel – variabel dan nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi memiliki distribusi yang tidak atau normal (Suliyanto, 2011:69). Dengan uji normalitas ini biasanya menggunakan grafik normal P-Plot namun ada juga satu uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji Uji normalitas residual adalah dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Dengan ketentuan yaitu apabila nilai Sig atau signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi tersebut ialah normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2017:33). Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah: (1) Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, multikolinearitas tidak akan terjadi, (2) Apabila nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka korelasi antara salah satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya akan terlalu besar yang berarti akan terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW test). Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1, apabila ada korelasi maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi (Ghozali, 2017:93). Deteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu: (1) Nilai DW lebih rendah dari -2 sehingga terdapat korelasi positif, (2) Nilai DW diantara -2 sampai 2 maka tidak terdapat autokorelasi, (3) Nilai DW diatas 2 maka terdapat korelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya tidak sama dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas salah satunya dengan menggunakan scatter plot dengan dasar analisis sebagai berikut (Ghozali, 2017: 49): (1) Jika tidak adanya pola jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, maka terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Model Regresi

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*) atau dapat disebut juga dengan uji F ini, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen sesuai sebagai variabel penjelas terhadap variabel dependen. kriteria pengambilan keputusannya adalah

(1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk tujuan menguji tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual parsial. Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. (1) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesisnya diterima dan artinya variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya. (2) Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesisnya tidak diterima dan artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Objek Penelitian

Jawa timur merupakan sebuah provinsi dibagian Timur Pulau Jawa yang berada di Indonesia. Ibu Kota Jawa Timur Terletak di Surabaya. Dan memiliki luas wilayah 47.922 km². Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 Kabupaten dan kota. Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 38 Kabupaten/ kota.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai deskripsi dari variabel dan melihat hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian informasi dan data yang disajikan meliputi dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata - rata dan nilai standar deviasi dari masing - masing variabel penelitian.

Tabel 1
Pengujian Deskriptif Variabel Penelitian
(Jutaan Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	190	78288135.00	5145149899.00	414509315.7579	696318032.02726
BM	190	215804478.00	4861464048.00	840900971.3368	595457994.03800
DAU	190	66568924.00	1709892845.00	938191208.6000	286696916.66541
PE	190	85822000.00	3873334000.00	444486856.0526	569430948.95794
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pendapatan Asli Daerah pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa observasi (N) penelitian ini sebesar 190. Nilai Pendapatan Asli Daerah terkecil sebesar Rp78.288.135 yang dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2014. Dan nilai terbesar pendapatan asli daerah adalah Rp5.145.149.899 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2017. Rata - rata nilai

Pendapatan Asli Daerah di 38 Kabupaten / Kota Jawa Timur Pada tahun 2014 – 2018 adalah sebesar Rp414.509.315,7579 sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp696.318.032,02726.

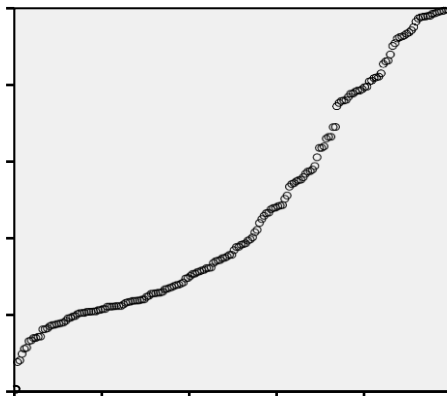
Belanja Modal pada Tabel 1 diatas pada variabel Belanja Modal nilai terkecil adalah sebesar Rp215.804.478 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo pada tahun 2018. Dan nilai terbesar Belanja Modal adalah Rp4.861.464.048 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2018. Rata - rata nilai Belanja Modal di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2014 2018 adalah sebesar Rp840.900.971,3368. Sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp595.457.994,03800.

Dana Alokasi Umum pada Tabel 1 diatas pada variabel Dana Alokasi Umum nilai terkecil adalah sebesar Rp66.568.924 yang dimiliki oleh Kab.Bojonegoro pada tahun 2017. Dan nilai terbesar Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp1.709.892.845 yang dimiliki oleh Kab.Jember pada tahun 2016. Rata - rata nilai Dana Alokasi Umum di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2014 – 2018 adalah sebesar Rp938.191.208,6000. Sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp286.696.916,66541.

Pertumbuhan Ekonomi pada Tabel 1 diatas pada variabel Pertumbuhan Ekonomi nilai terkecil adalah sebesar Rp85.822.000 yang dimiliki oleh Kab.Pacitan pada tahun 2014. Dan nilai terbesar Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar Rp3.873.334.000 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2018. Rata - rata nilai Pertumbuhan Ekonomi di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2014 – 2018 adalah sebesar Rp444.486.856,0526. Sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp569.430.948,95794.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PE



Gambar 1
Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa pada data atau titik - titik penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan pola berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai *tolerance*. Seperti yang disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	.183	5.470	Bebas Multikolinearitas
BM	.157	6.376	Bebas Multikolinearitas
DAU	.711	1.407	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari hasil uji pada Tabel 3 yaitu uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance yang ada di table 3 PAD sebesar 0,183 untuk BM di tabel 3 sebesar 0,157 dan untuk DAU pada Tabel 3 sebesar 0,711. Sedangkan nilai VIF untuk PAD pada tabel 3 sebesar 5.470, BM sebesar 6.376 dan untuk DAU sebesar 1.407. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokolerasi

Nilai Durbin-Watson (DW) dari hasil perhitungan regresi seperti disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

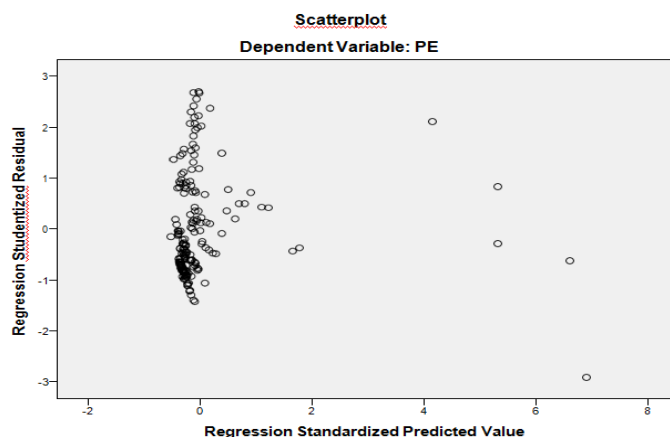
Model	Model Summary ^b
	Durbin-Watson
1	0,533

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 yang merupakan hasil dari uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 0,533, dimana nilai tersebut terletak berada diantara -2 dan 2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari autokorelasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.



Gambar 2
Grafik Scatterplot

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 grafik *scatterplot* diatas, diketahui titik - titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Glejser

Tabel 5
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	228003166,085	28310232,633		8.054	.000
PAD	.052	.027	.317	1.896	.059
BM	-.042	.034	-.221	-1.226	.222
DAU	-.061	.034	-.153	-1.805	.073

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan uji gletser pada Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,059 yang berarti bahwa nilai signifikasi tersebut lebih dari 0,05, nilai signifikasi variabel belanja modal adalah sebesar 0,222 yang berarti bahwa nilai signifikasi tersebut lebih dari 0,05 dan nilai signifikasi variabel dana alokasi umum adalah sebesar 0,073 yang berarti bahwa nilai signifikasi variabel tersebut lebih dari 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil pengelolaan data dengan menggunakan program *SPSS for windows 23.0* diperoleh hasil regresi linear berganda yang dipaparkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	400874450.9	49587069.75		8.084	.000
PAD	.812	.048	.992	16.969	.000
BM	-.021	.060	-.021	-.340	.734
DAU	-.294	.059	-.148	-4.985	.000

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dengan demikian berdasarkan hasil pada Tabel 6 nilai - nilai tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PE = 400.874.450,9 + 0,812 \text{ PAD} + -0,21 \text{ BM} + -0,294 \text{ DAU} + e$$

Uji Kelayakan Model
Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.416E+19	3	1.805E+19	471.128	.000 ^b
Residual	7.127E+18	186	3.832E+16		
Total	6.128E+19	189			

a. Dependent Variable: PE

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD, BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari hasil uji statistik F pada Tabel 7, diketahui nilai F sebesar 471,128 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,940 ^a	0,884	0,882	195747190,7

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, BM

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8 diketahui nilai R^2 sebesar 0,882 atau 88,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan Belanja modal terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun berikutnya di 38 Kabupaten / kota Jawa Timur. Sedangkan sisanya 11,8% merupakan faktor lainnya yang tidak ada didalam penelitian namun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya Lain - lain pendapatan yang sah, Belanja Operasi dan belanja tidak terduga lainnya.

Pengujian Hipotesis

Tabel 9
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	400874450.9	49587069.75		8.084	.000
PAD	.812	.048	.992	16.969	.000
BM	-.021	.060	-.021	-.340	.734
DAU	-.294	.059	-.148	-4.985	.000

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Tabel 9 besarnya nilai thitung variabel bebas pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,812 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000, dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikan t < 0,05. Hal ini menunjukkan H₁ diterima sehingga variabel bebas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂ : Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji pengaruh variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tabel 9 besarnya nilai thitung variabel bebas belanja modal adalah sebesar -0,021 dengan nilai signifikan t sebesar 0,734, dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi t > 0,05. Hal ini menunjukkan H₂ ditolak sehingga variabel bebas belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₃ : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji pengaruh variabel dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Tabel 9 besarnya nilai thitung variabel bebas dana alokasi umum adalah sebesar -0,294 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000, dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi t > 0,05. Hal ini menunjukkan H₃ ditolak sehingga variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi". Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,812 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya hasil penelitian di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian ketika faktor pendapatan asli daerah bertambah, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah.

Tingkat pendapatan asli daerah mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, ketika pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian, hal yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak memberikan arti apabila tidak di ikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Hasil pengujian hipotesis menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar -0,021 dengan nilai signifikan sebesar 0,734 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang artinya belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja

modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, kemudian pelaksanaan, baru dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian belanja modal untuk pembangunan tidak selalu langsung dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian, seperti pembelian tanah untuk aset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasarana baru dapat digunakan.

Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis ketiga menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,294 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin. Menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan dana transfer daerah yang selama ini dialokasikan melalui APBN tak banyak membantu dalam percepatan pembangunan. Sebab, sebagian besar dana itu habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum berpengaruh negatif oleh karenanya sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi dana umum dan belanja modal pada bidang - bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas - fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Semakin besar nilai PAD suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Belanja Modal perlu ada kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Agar melalui belanja modal ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah itu sendiri dan menjadi daerah yang mandiri agar infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Dana Alokasi Umum ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum berpengaruh negatif oleh karenanya sebaiknya pemerintah memprioritaskan lokasi dana umum dan belanja modal pada bidang - bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas - fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Keterbatasan

Penelitian hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi umum. Dan Periode penelitian ini hanya 5 periode dari tahun 2014 - 2018, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengambilan penelitian sehingga hasilnya dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Timur untuk bias meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang cepat dan tepat agar belanja modal dapat dipakai dengan seoptimal mungkin

untuk kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain menambah jumlah sampel, peneliti selanjutnya disarankan mengambil data sampel di luar Jawa Timur untuk membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku juga kepada Kabupaten / Kota di provinsi lainnya. (3) Penelitian yang akan datang disarankan agar lebih lengkap dan berbeda, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran – ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ni Made Dwi; I Wayan Bagia, Fridayana Yudiaatmaja. 2014. Pengaruh Perputaran Kas dan Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomis pada Koperasi. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* 2.
- Anthony, R.N., dan V. Govindarajan. 2005. *Management Control System Buku 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. 2014-2018. Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2014-2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Fani Wiraswasta, M.Pudjihadjo, dan Putu Mahardika Adis. 2018. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Brawijaya* 5(2): 170-180.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga*. Salemba Empat. Jakarta
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/>. Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syah Kuala*.
- Michael Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Nordiawan, D. Iswahyudi dan Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, 2nd ed. John Welly & Sons Ltd. New York.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2007. *Makro ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi SPSS*. Yogyakarta.
- Susanti, H., Moh. Ikhsan, dan Widyanti, 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi* ed. 2. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta
- Syaiful. 2006. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>. 10 April 2021.
- Syarifin, Pipin dan D. Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV Pustaka Setia. Bandung

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, p.